

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

LAPORAN KEUANGAN

Triwulan III

Periode Tahun 2023

Kode Satker 401909

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin Kelurahan Mulia Agung

Kec. Banyuasin III

Banyuasin - Sumatera Selatan

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com



**LAPORAN KEUANGAN
PENGADILAN NEGERI
PANGKALAN BALAI**

Untuk Periode yang Berakhir 30 September 2023

BAGIAN ANGGARAN 005.01

BADAN URUSAN ADMINISTRASI

MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

**Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan**

Telp/Fax. (0711) 5723669

e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

KATA PENGANTAR

Kata Pengantar

Sebagaimana diamanatkan Undang-undang RI Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016, Menteri / Pimpinan Lembaga sebagai Pengguna Anggaran / Barang mempunyai tugas antara lain menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara / Lembaga yang dipimpinnya.

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu Entitas Akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasi, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Penyusunan Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai mengacu pada PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga serta Surat No. S-40-PB-PB6-2022 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian LKKL Triwulan III Tahun 2022 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi. Laporan Keuangan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi keuangan yang transparan, akurat dan akuntabel.

Laporan Keuangan ini diharapkan dapat memberikan informasi yang berguna kepada para pemakai laporan khususnya sebagai sarana untuk meningkatkan akuntabilitas/pertanggungjawaban dan transparansi pengelolaan keuangan negara pada Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai. Disamping itu, laporan keuangan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam pengambilan keputusan dalam usaha untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

Pangkalan Balai, 03 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,


ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

DAFTAR ISI

Daftar Isi

Kata Pengantar	iii
Daftar Isi	ii
Daftar Tabel dan Lampiran	iv
Pernyataan Tanggung Jawab	v
Ringkasan	1
I. Laporan Realisasi Anggaran	5
II. Neraca	7
III. Laporan Operasional	10
IV. Laporan Perubahan Ekuitas	11
V. Catatan atas Laporan Keuangan	13
A. Penjelasan Umum	13
A.1. Dasar Hukum	13
A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai	14
A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan	15
A.4. Basis Akuntansi	16
A.5. Dasar Pengukuran	16
A.6. Kebijakan Akuntansi	16
B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran	24
B.1. Pendapatan Negara dan Hibah	24
B.2. Belanja	24
C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca	26
C.1. Aset Lancar	26
C.2. Aset Tetap	27
C.5. Kewajiban Jangka Pendek	28
C.6. Ekuitas	28
D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional	29
D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak	29
D.2. Beban Pegawai	29

D.3.	Beban Persediaan	29
D.4.	Beban Barang dan Jasa	29
D.5.	Beban Pemeliharaan	30
D.6.	Beban Perjalanan Dinas	30
D.7.	Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat	30
D.8.	Beban Bantuan Sosial	30
D.9.	Beban Penyusutan dan Amortisasi	30
D.10.	Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih	31
D.11.	Beban Lain-lain	31
D.12.	Kegiatan Non Operasional	31
D.13.	Pos Luar Biasa	31
E.	Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas	31
E.1.	Ekuitas Awal	31
E.2.	Surplus (defisit) LO	31
E.3. 1.	Penyesuaian Nilai Aset	32
E.3. 2	Koreksi Nilai Persediaan	32
E.3. 3	Selisih Revaluasi Aset Tetap	32
E.3. 4	Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi	32
E.3. 5	Koreksi Lain-lain	32
E.3. 6	Ekuitas Akhir	32
F.	Pengungkapan Penting Lainnya	33
F.1.	Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca	33
F.2.	Pengungkapan Lain-lain	33

DAFTAR TABEL

Daftar Tabel dan Lampiran

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022	2
Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBPN per 30 September 2023	23
Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBPN per 30 September 2023 dan 2022	23
Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2023	24
Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September 2023	24

PERNYATAAN TANGGUNGJAWAB

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Jl. Komplek Perkantoran Pemkab. Banyuasin, Kel. Mulia Agung Kec. Banyuasin III
Banyuasin - Sumatera Selatan
Telp/fax : (0711)-5723669
e-mail : pn-pangkalanbalai@gmail.com

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2023 yang terdiri dari: Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, dan Catatan atas Laporan Keuangan per 30 September Tahun Anggaran 2023 sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Pangkalan Balai, 03 Oktober 2023
Kuasa Pengguna Anggaran,
Sekretaris,

ANDRIANTO FACHRIZAL, S.Kom.
NIP.19761203 201101 1 005

RINGKASAN

Ringkasan

Berdasarkan PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga, Menteri/Pimpinan Lembaga selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang menyusun dan menyampaikan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL) yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan kepada Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal, dalam rangka penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP).

Laporan Keuangan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai Triwulan III Tahun 2023 ini telah disusun dan disajikan sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan berdasarkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan. Laporan Keuangan ini meliputi :

1. LAPORAN REALISASI ANGGARAN

Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) TA 2023 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, yang terdapat dalam periode tersebut. Untuk Belanja, dimana Jumlah Belanja dengan anggaran Rp11.752.414.000,- (sebelas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah) terealisasi untuk Triwulan III sebesar Rp5.374.024.071,- (lima milyar tiga ratus tujuh puluh empat juta dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah).

2. NERACA

Neraca menggambarkan posisi keuangan entitas mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana per 30 September 2023.

Neraca yang disajikan adalah hasil dari proses Sistem Akuntansi Instansi, sebagaimana yang diwajibkan dalam PMK Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK.05/2016, dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas PMK Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga.

Nilai Aset Triwulan III Tahun 2023 per 30 September 2023 yang terdiri dari : Aset Lancar sebesar Rp38.075.941,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu ribu), kewajiban sebesar Rp2.342.560.914- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua ribu lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah) dan Ekuitas sebesar Rp35.223.922.727,- (tiga puluh lima milyar dua ratus dua puluh tiga juta sembilan ratus dua puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah).

Ringkasan Neraca per 30 September 2023 dan 2022 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 1 Ringkasan Neraca per 30 September TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	Periode Neraca		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2023	2022	Rp	%
ASET LANCAR				
Kas di bendahara pengeluaran	35.400.000	0	35.400.000	0.00
Persediaan	0	0	0	0.00
Jumlah Aset Lancar	38.075.941	0	38.075.941	
ASET TETAP				
Tanah	2.819.580.000	2.819.580.000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3.614.686.310	3.587.381.310	27.305.000	0.76
Gedung dan Bangunan	310.781.000	310.781.000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190.000	190.000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	30.463.889.131	26.748.832.288	3.715.086.843	13.89
Akumulasi Penyusutan	(2.023.279.655)	(1.682.459.330)	(340.820.325)	20.26
Jumlah Aset Tetap	35.185.846.786	31.784.305.268	3.401.541.518	10.70
Jumlah Aset	35.223.922.727	31.784.305.268	3.439.617.459	10.82
Kewajiban				
Kewajiban Jangka Pendek				
Utang kepada pihak ketiga	2.280.658.806	1.784.638	2.278.874.168	127.693.92
Utang Yang Belum Ditagihkan	26.502.108	0	26.502.108	0.00
Uang Muka dari KPPN	35.400.000	0	35.400.000	0.00
Jumlah Kewajiban	2.342.560.914	1.784.638	2.340.776.276	131.162.53
Ekuitas	32.881.361.813	31.782.520.630	(1.098.841.183)	(3.46)
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas	35.223.922.727	31.784.305.268	3.439.617.459	10.52

3. LAPORAN OPERASIONAL

Laporan Operasional menyajikan berbagai unsur pendapatan-LO, beban, surplus(defisit) dari operasi, surplus(defisit) dari kegiatan nonoperasional, surplus(defisit) sebelum pos luar biasa, pos luar biasa, dan surplus(defisit) -LO, yang diperlukan untuk penyajian yang wajar. Pada laporan Triwulan III Tahun 2023 untuk periode 2023, pendapatan Operasional sebesar Rp0, Beban

Operasional Rp4.268.485.635,- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) Surplus/ (Defisit)-LO sebesar Rp(4.000.724.899),- (empat milyar tujuh ratus dua puluh empat ribu delapan ratus sembilan puluh sembilan rupiah).

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Laporan Perubahan Ekuitas menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Ekuitas yang berakhir pada periode 30 September 2023 dimana Ekuitas Awal sebesar Rp31.782.520.630,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah) Surplus/(Defisit)-LO sebesar Rp(4.268.485.635),- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah) dan Ekuitas akhir sebesar Rp32.881.361.813,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu delapan ratus tiga belas rupiah).

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menyajikan informasi tentang penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dan Neraca. Termasuk pula dalam CaLK adalah penyajian informasi yang diharuskan dan dianjurkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan serta pengungkapan-pengungkapan lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar atas laporan keuangan.

Dalam penyajian Laporan Realisasi Anggaran untuk periode yang berakhir sampai dengan tanggal 30 September 2023, Pendapatan Negara dan Hibah dan Belanja Negara diakui berdasarkan basis kas, yaitu diakui pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara. Sedangkan Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas disusun dan disajikan dengan basis akrual.

Dalam penyajian Neraca untuk periode tahun 2023, nilai Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu diakui pada saat diperolehnya hak atas dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas negara.

I. LRA PERBANDINGAN

I. Laporan Realisasi Anggaran

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN REALISASI ANGGARAN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 September 2023
(dalam satuan Rupiah)

	Uraian	Catatan	PER 30 September 2023		
			Anggaran	Realisasi	%
A.	Pendapatan Negara dan Hibah	B.1			
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	B.1.1	0	1.075.503	0,00
	Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah		0	1.075.503	0,00
B.	Belanja Negara	B.2			
1.	Belanja Pegawai	B.2.1.	3.669.983.000	2.634.859.965	71
2.	Belanja Barang	B.2.2.	1.413.335.000	1.067.139.813	76
3.	Belanja Modal	B.2.3.	6.639.096.000	1.645.024.293	25
	Jumlah Belanja Negara		11.722.414.000	5.347.024.071	172

II. NERACA PERBANDINGAN

II. Neraca

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

NERACA

PER 30 September 2023

(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023
ASET		
Aset Lancar	C.1	
Kas dan Bank		
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.1. 1.	35.400.000
Belanja Dibayar Dimuka (prepaid)	C.1. 2.	0
Persediaan	C.1. 3.	2.449.000
Jumlah Aset Lancar		38.075.941
Aset Tetap	C.2	
Tanah	C.2. 1.	2.819.580.000
Peralatan dan Mesin	C.2. 2.	3.614.686.310
Gedung dan Bangunan	C.2. 3.	310.781.000
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	C.2. 4.	190.000
Aset Tetap Lainnya	C.2. 5.	30.463.889.131
Konstruksi dalam Pengerjaan	C.2. 6.	(2.023.279.655)
Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	C.2. 7.	35.185.846.786
Jumlah Aset Tetap		35.223.922.727
Jumlah Aset		3.614.686.310
KEWAJIBAN		
Kewajiban Jangka Pendek	C.5	
Utang kepada pihak ketiga	C.5 1.	2.280.658.806
Utang yang belum ditagihkan	C.5 2.	26.502.108
Uang Muka dari KPPN	C.5. 3.	35.400.000
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		2.342.560.914
Jumlah Kewajiban		2.280.658.806
EKUITAS		
Ekuitas	C.6	32.881.361.813
Jumlah Ekuitas Dana		32.881.361.813
Jumlah Kewajiban dan Ekuitas		35.223.922.727

III. LAPORAN OPERASIONAL

III. Laporan Operasional

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN OPERASIONAL
PER 30 September 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	Catatan	30 September 2023	Semester I TA 2023
Kegiatan Operasional			
Pendapatan			
Pendapatan Negara Bukan Pajak	D.1	0	0
Jumlah Pendapatan		0	0
Beban			
Beban Pegawai	D. 2	2,846.349.233	2,847.326.141
Beban Persediaan	D. 3	17.051.200	23.250.250
Beban Barang dan Jasa	D. 4	650.890.309	745.379.156
Beban Pemeliharaan	D. 5	381.923.762	108.685.871
Beban Perjalanan Dinas	D. 6	35.680.000	41.061.343
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	D. 7	0	0
Beban Bantuan Sosial	D. 8	0	0
Beban Penyusutan dan Amortisasi	D. 9	337.893.575	235.022.138
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	D. 10	0	0
Beban Lain-lain	D. 11	0	0
Jumlah Beban		4.269.788.079	4.000.724.899
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Operasional		(4.268.485.635)	(4.000.724.899)
Kegiatan Non Operasional			
Surplus/(Defisit) Pelepasan Aset Non Lancar	D. 12	0	0
Surplus/(Defisit) Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang		0	0
Surplus/(Defisit) Dari Kegiatan Non Operasional Lainnya		0	0
Surplus (Defisit) dari Kegiatan Non Operasional		0	157
Surplus (Defisit) Sebelum Pos Luar Biasa			
Pos Luar Biasa			
Beban Luar Biasa	D. 13	0	0
Surplus (Defisit) LO		(4.268.485.635)	(4.000.724.899)

IV. Laporan Perubahan Ekuitas

PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS
PER 30 September 2023 DAN 2022
(dalam satuan Rupiah)

URAIAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	30 September 2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
EKUITAS AWAL	31.782.520.630	27.156.365.131	4.626.155.499	-
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4.268.485.635)	(4.000.724.742)	(267.760.893)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS YANG ANTARA LAIN BERASAL DARI DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI/KESALAHAN MENDASAR	0	0	0	-
Penyesuaian Nilai Aset	0	0	0	-
Koreksi Nilai Persediaan	0	0	0	-
Koreksi Atas Reklasifikasi	0	0	0	-
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0	0	0	-
Koreksi Nilai Aset Tetap/Lainnya Non Revaluasi	0	0	0	-
Koreksi Lain-lain	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5.367.326.818	3.841.509.991	(1.525.816.827)	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	(1.098.841.183)	(159.214.751)	(1.258.055.934)	-
EKUITAS AKHIR	32.881.361.813	26.997.150.380	5.884.211.433	-

V. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

V. Catatan atas Laporan Keuangan

A. Penjelasan Umum

A.1. Dasar Hukum

- a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara;
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008;
- e. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-62/PB/2009 tentang Tata cara Penyajian Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual pada Laporan Keuangan;
- f. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua dan PP Nomor 45 Tahun 2013 mengenai Perubahan Ketiga atas Keputusan Presiden Nomor 42 tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- h. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 233/PMK.05/2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat;
- i. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan nomor PER-80/PB/2011 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Pendapatan, Belanja, dan Transfer pada Bagan Akun Standar;

- j. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-42/PB/2012 tentang Penambahan dan Perubahan Akun Non Anggaran dan Neraca pada Bagan Akun Standar;
- k. Peraturan Sekretaris Mahkamah Agung No. 003/SEK/12/2012 mengenai Pedoman Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 01/PMK.06/2013 tentang Penyusutan Barang Milik Negara Berupa Aset Tetap Pada Entitas Pemerintah Pusat;
- m. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat
- n. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga;
- o. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015.
- p. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 213/PMK.05/2013 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 215/PMK/.05/2016.
- q. Surat Kementerian Keuangan Republik Indonesia Direktora Jenderal Perbendaharaan Nomor S-40/PB/PB.6/2022 tanggal 30 September 2023 Tentang Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 serta Pelaksanaan Rekonsiliasi.

A.2. Profil dan Kebijakan Teknis Pengadilan Negeri Pangkalan Balai

Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah salah satu entitas akuntansi di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Salah satu pelaksanaannya adalah dengan menyusun laporan keuangan, melalui peran tersebut diharapkan kualitas laporan K/L dapat ditingkatkan yang pada akhirnya Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dapat disajikan dengan akuntabel, akurat dan transparan.

Tahun 2023 merupakan bagian dari rencana strategis Mahkamah Agung dimana pelaksanaan dan perencanaan sudah berbasis kinerja. Program dan kegiatan Pengadilan Negeri Pangkalan Balai pada mengacu pada program-program yang dicanangkan oleh Mahkamah Agung dan dituangkan dalam visi dan misi Pengadilan Negeri Pangkalan Balai.

Untuk mewujudkan tujuan di Pengadilan Negeri Pangkalan Balai berkomitmen dengan visi :

1. *Menjaga Kemandirian*
2. *Pelayanan Hukum yang berkeadilan*
3. *Meningkatkan Kredibilitas Profesional dan Transparansi*
4. *Pelayanan yang Efektif, Efisien dan Transparansi*

Untuk mewujudkan visi tersebut akan dilakukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

- Memberikan Fungsi Kekuasaan Kehakiman Secara Efektif dan Efisien.
- Memberikan pelayanan hukum yang mempunyai kepastian dan berkeadilan.
- Menciptakan kredibilitas profesional dan transparansi.

A.3. Pendekatan Penyusunan Laporan Keuangan

Laporan Keuangan Triwulan III Tahun 2023 ini merupakan laporan yang mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh Kantor. Laporan Keuangan ini dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Instansi (SAI) yaitu serangkaian prosedur manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan dan pengikhtisaran sampai dengan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pada Kementerian Negara/Lembaga.

SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrua (SAIBA) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). SAI dirancang untuk menghasilkan Laporan Keuangan Satuan Kerja yang terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas. Sedangkan SIMAK-BMN adalah sistem yang menghasilkan informasi aset tetap, persediaan, dan aset lainnya untuk penyusunan neraca dan laporan barang milik negara serta laporan manajerial lainnya.

A.4. Basis Akuntansi

Kantor menerapkan basis akrual dalam penyusunan dan penyajian Neraca, Laporan Operasional, dan Laporan Perubahan Ekuitas serta basis kas untuk penyusunan dan penyajian Laporan Realisasi Anggaran. Basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayarkan. Sedangkan basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi atau peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Hal ini sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.

A.5. Dasar Pengukuran

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Dasar pengukuran yang diterapkan Kantor dalam penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan adalah dengan menggunakan nilai perolehan historis.

Aset dicatat sebesar pengeluaran/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari imbalan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing dikonversi terlebih dahulu dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

A.6. Kebijakan Akuntansi

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Tahun 2023 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP). Kebijakan akuntansi merupakan prinsip-prinsip, dasar-dasar, konvensi konvensi, aturan-aturan, dan praktik-praktik spesifik yang dipilih oleh suatu entitas pelaporan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan. Disamping itu, dalam penyusunannya telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Kebijakan-kebijakan akuntansi yang penting yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan Kantor Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah sebagai berikut:

(1.) Pendapatan LRA

- Pendapatan-LRA diakui pada saat kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN).
- Akuntansi pendapatan-LRA dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan-LRA disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(2.) Pendapatan LO

- Pendapatan-LO adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali.
- Pendapatan-LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan /atau Pendapatan direalisasi, yaitu adanya aliran masuk sumber daya ekonomi. Secara khusus pengakuan pendapatan-LO pada Badan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan adalah sebagai berikut:
 - Pendapatan Jasa Pelatihan diakui setelah pelatihan selesai dilaksanakan
 - Pendapatan Sewa Gedung diakui secara proporsional antara nilai dan periode waktu sewa.
 - Pendapatan Denda diakui pada saat dikeluarkannya surat keputusan denda atau dokumen lain yang dipersamakan
- Akuntansi pendapatan-LO dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran).
- Pendapatan disajikan menurut klasifikasi sumber pendapatan.

(3.) Belanja

- Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Negara yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah.
- Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN.
- Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

- Belanja disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi akan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4.) Beban

- Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
- Beban diakui pada saat timbulnya kewajiban; terjadinya konsumsi aset; terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa.
- Beban disajikan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja dan selanjutnya klasifikasi berdasarkan organisasi dan fungsi diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(5.) Aset

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, Piutang Jangka Panjang dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

- Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.
- Investasi Jangka Pendek BLU dalam bentuk surat berharga disajikan sebesar nilai perolehan sedangkan investasi dalam bentuk deposito dicatat sebesar nilai nominal.
- Piutang diakui apabila memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a) Piutang yang timbul dari Tuntutan Perbendaharaan/Ganti Rugi apabila telah timbul hak yang didukung dengan Surat Keterangan Tanggung Jawab Mutlak dan/atau telah dikeluarkannya surat keputusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b) Piutang yang timbul dari perikatan diakui apabila terdapat peristiwa yang menimbulkan hak tagih dan didukung dengan naskah perjanjian yang menyatakan hak dan kewajiban secara jelas serta jumlahnya bisa diukur dengan andal

- Piutang disajikan dalam neraca pada nilai yang dapat direalisasikan (*net realizable value*). Hal ini diwujudkan dengan membentuk penyisihan piutang tak tertagih. Penyisihan tersebut didasarkan atas kualitas piutang yang ditentukan berdasarkan jatuh tempo dan upaya penagihan yang dilakukan pemerintah. Perhitungan penyisihannya adalah sebagai berikut:

Penggolongan Kualitas Piutang

Kualitas Piutang	Uraian	Penyisihan
Lancar	Belum dilakukan pelunasan s.d. tanggal jatuh tempo	0.5%
Kurang Lancar	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Pertama tidak dilakukan pelunasan	10%
Diragukan	Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Kedua tidak dilakukan pelunasan	50%
Macet	1. Satu bulan terhitung sejak tanggal Surat Tagihan Ketiga tidak dilakukan pelunasan 2. Piutang telah diserahkan kepada Panitia Urusan Piutang Negara/DJKN	100%

- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tuntutan Perbedaharaan/Ganti Rugi (TP/TGR) yang akan jatuh tempo 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai Bagian Lancar TP/TGR atau Bagian Lancar TPA.
- Nilai Persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik pada tanggal neraca dikalikan dengan:
 - harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian;
 - harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri;
 - harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya.

b. Aset Tetap

- Aset tetap mencakup seluruh aset berwujud yang dimanfaatkan oleh pemerintah maupun untuk kepentingan publik yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 tahun.
- Nilai Aset tetap disajikan berdasarkan harga perolehan atau harga wajar.
- Pengakuan aset tetap didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi sebagai berikut:
 - a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang

nilainya sama dengan atau lebih dari Rp1.000.000 (satu juta rupiah);

- b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp25.000.000 (dua puluh lima juta rupiah);
- c) Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian.
 - Aset Tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan operasional pemerintah yang disebabkan antara lain karena aus, ketinggalan jaman, tidak sesuai dengan kebutuhan organisasi yang makin berkembang, rusak berat, tidak sesuai dengan rencana umum tata ruang (RUTR), atau masa kegunaannya telah berakhir direklasifikasi ke Aset Lain-Lain pada pos Aset Lainnya.
 - Aset tetap yang secara permanen dihentikan penggunaannya, dikeluarkan dari neraca pada saat ada usulan penghapusan dari entitas sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di bidang pengelolaan BMN/BMD.

c. Penyusutan Aset Tetap

- Penyusutan aset tetap adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset tetap.
- Penyusutan aset tetap tidak dilakukan terhadap:
 - a. Tanah
 - b. Konstruksi dalam Pengerjaan (KDP)
 - c. Aset Tetap yang dinyatakan hilang berdasarkan dokumen sumber sah atau dalam kondisi rusak berat dan/atau usang yang telah diusulkan kepada Pengelola Barang untuk dilakukan penghapusan
- Penghitungan dan pencatatan Penyusutan Aset Tetap dilakukan setiap akhir semester tanpa memperhitungkan adanya nilai residu.
- Penyusutan Aset Tetap dilakukan dengan menggunakan metode garis lurus yaitu dengan mengalokasikan nilai yang dapat disusutkan dari Aset Tetap secara merata setiap semester selama Masa Manfaat.
- Masa Manfaat Aset Tetap ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 59/KMK.06/2013 tentang Tabel Masa Manfaat Dalam Rangka Penyusutan Barang Milik Negara berupa Aset Tetap pada Entitas

Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tetap

Kelompok Aset Tetap	Masa Manfaat
Peralatan dan Mesin	2 s.d. 20 tahun
Gedung dan Bangunan	10 s.d. 50 tahun
Jalan, Jaringan dan Irigasi	5 s.d 40 tahun
Aset Tetap Lainnya (Alat Musik Modern)	4 tahun

d. Piutang Jangka Panjang

- Piutang Jangka Panjang adalah piutang yang diharapkan/dijadwalkan akan diterima dalam jangka waktu lebih dari 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.
- Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR) dinilai berdasarkan nilai nominal dan disajikan sebesar nilai yang dapat direalisasikan

e. Aset Lainnya

- Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, aset tetap, dan piutang jangka panjang. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah aset tak berwujud, tagihan penjualan angsuran yang jatuh tempo lebih dari 12 (dua belas) bulan, aset kerjasama dengan pihak ketiga (kemitraan), dan kas yang dibatasi penggunaannya.
- Aset Tak Berwujud (ATB) disajikan sebesar nilai tercatat neto yaitu sebesar harga perolehan setelah dikurangi akumulasi amortisasi.
- Amortisasi ATB dengan masa manfaat terbatas dilakukan dengan metode garis lurus dan nilai sisa nihil. Sedangkan atas ATB dengan masa manfaat tidak terbatas tidak dilakukan amortisasi.
- Masa Manfaat Aset Tak Berwujud ditentukan dengan berpedoman Keputusan Menteri Keuangan Nomor: 620/KM.6/2015 tentang Masa Manfaat Dalam Rangka Amortisasi Barang Milik Negara berupa Aset Tak Berwujud pada Entitas Pemerintah Pusat. Secara umum tabel masa manfaat adalah sebagai berikut:

Penggolongan Masa Manfaat Aset Tak Berwujud

Kelompok Aset Tak Berwujud	Masa Manfaat (tahun)
<i>Software Komputer</i>	4
<i>Franchise</i>	5
Lisensi, Hak Paten Sederhana, Merk, Desain Industri, Rahasia Dagang, Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu.	10
Hak Ekonomi Lembaga Penyiaran, Paten Biasa, Perlindungan Varietas Tanaman Semusim.	20
Hak Cipta Karya Seni Terapan, Perlindungan Varietas Tanaman Tahunan	25
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.II, Hak Ekonomi Pelaku Pertunjukan, Hak Ekonomi Produser Fonogram.	50
Hak Cipta atas Ciptaan Gol.I	70

- Aset Lain-lain berupa aset tetap pemerintah disajikan sebesar nilai buku yaitu harga perolehan dikurangi akumulasi penyusutan.

(6.) Kewajiban

- Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah.
- Kewajiban pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.
 - (1.) Kewajiban Jangka Pendek
 - (2.) Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
 - (3.) Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Belanja yang Masih Harus Dibayar, Pendapatan Diterima di Muka, Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.
 - (4.) Kewajiban Jangka Panjang
 - (5.) Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.
- Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung..

(7.) Ekuitas

- Ekuitas merupakan merupakan selisih antara aset dengan kewajiban dalam satu periode. Pengungkapan lebih lanjut dari ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

B. Penjelasan atas Pos-pos Realisasi Anggaran

B.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi
Pendapatan
Negara dan
Hibah :
Rp1.075.503

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.075.503 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.075.503. Keseluruhan Pendapatan Negara dan Hibah yang diterima oleh Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Lainnya.

Tabel 2 Rincian Estimasi dan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Estimasi Pendapatan	Realisasi	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.075.503	1.075.503	0
	Total Pendapatan	1.075.503	1.075.503	0

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.075.503 atau mencapai 0 persen dari estimasi pendapatan yang ditetapkan sebesar Rp1.075.503.

Perbandingan realisasi PNBP TA 2023 dan 2022 disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 3 Perbandingan Realisasi PNBP per 30 September TA 2023 dan 2022
(dalam satuan Rupiah)

No.	Uraian	Per 30 September 2023	2022	Perubahan	
				Rp	%
1.	Penerimaan Negara Bukan Pajak	1.075.503	157	0	0
	Total Pendapatan	1.075.503	157	0	

B.2. Belanja

Realisasi Belanja
Negara : Rp
5.347.024.071

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September 2023 adalah sebesar Rp5.347.024.071,- (lima milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat tujuh puluh satu rupiah) dengan anggaran senilai Rp11.752.414.000,-(sebelas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah). Rincian anggaran dan realisasi belanja pada Triwulan III TA 2023 dapat dilihat pada tabel berikut

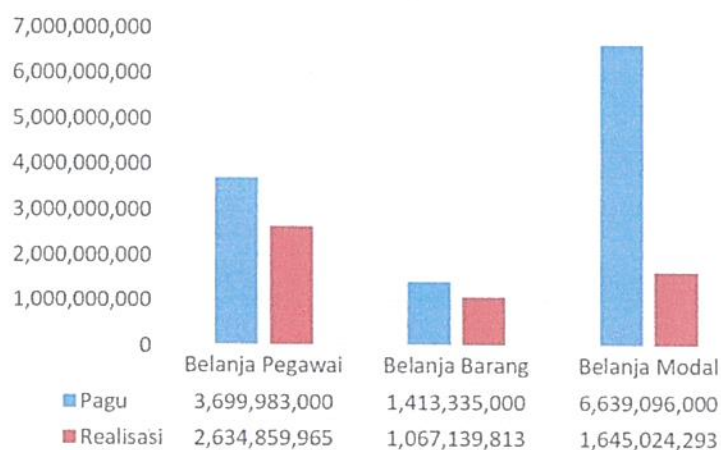
ini :

Tabel 4 Rincian Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)

Uraian	30 September TA 2023		
	Pagu	Realisasi	%
Belanja Pegawai	3.699.983.000	2.634.859.965	72
Belanja Barang	1.413.335.000	1.067.139.813	76
Belanja Modal	6.639.096.000	1.645.024.293	25
Total Belanja Bruto	11.722.414.000	5.347.024.071	45

Komposisi anggaran dan realisasi belanja dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 5 Komposisi Anggaran dan Realisasi Belanja per 30 September TA 2023
(dalam satuan Rupiah)



Sumber: Laporan Keuangan Sistem Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SAKPA) September 2023

Realisasi Belanja Negara Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 adalah sebesar Rp3.347.024.071,- (tiga milyar tiga ratus empat puluh tujuh juta dua puluh empat ribu tujuh puluh satu rupiah) atau sebesar 45% dari anggaran senilai Rp11.722.414.000,- (sebelas milyar tujuh ratus dua puluh dua juta empat ratus empat belas ribu rupiah).

B.2.1. Belanja Pegawai

Realisasi Belanja
Pegawai :
Rp2.634.859.965

Realisasi Belanja Pegawai Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 Rp2.634.859.965,- (dua milyar enam ratus tiga puluh empat juta delapan ratus lima puluh sembilan ribu sembilan ratus enam puluh lima rupiah) dari anggaran awal sebesar Rp3.699.983.000,- (tiga milyar enam ratus sembilan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh tiga ribu rupiah)

B.2.2. Belanja Barang

*Realisasi Belanja
Barang :
Rp1.067.139.813*

Realisasi Belanja Barang Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2023 sebesar Rp1.067.139.813,- (satu milyar enam puluh tujuh juta seratus tiga puluh sembilan ribu delapan ratus tiga belas rupiah) dari anggaran sebesar Rp1.413.335.000,- (satu milyar empat ratus tiga belas juta tiga ratus tiga puluh lima ribu rupiah)

B.2.3. Belanja Modal

*Realisasi Belanja
Modal :
Rp1.645.024.293*

Realisasi Belanja Modal Pengadilan Negeri Pangkalan Balai per 30 September TA 2022 adalah sebesar Rp1.645.024.293,- (satu milyar enam ratus empat puluh lima juta dua puluh empat ribu dua ratus sembilan puluh tiga rupiah) dari anggaran sebesar Rp6.639.096.000,- (enam milyar enam ratus tiga puluh sembilan juta sembilan puluh enam rupiah)

C. Penjelasan atas Pos-pos Neraca

*Aset Lancar:
Rp38.075.941*

C.1. Aset Lancar

Nilai Aset Lancar per 30 September TA 2023 sebesar Rp38.075.941,- (tiga puluh delapan juta tujuh puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh satu rupiah)

C.1.1. Kas di Bendahara Pengeluaran

*Kas di Bendahara
Pengeluaran:
Rp35.400.000*

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 30 September 2023 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan kas yang dikuasai, dikelola dan dibawah tanggungjawab Bendahara Pengeluaran yang berasal dari Uang Persediaan yang belum dipertanggungjawabkan atau disetorkan kembali ke kas negara per tanggal neraca.

C.1.2. Belanja Dibayar di Muka

*Belanja Dibayar
di Muka: Rp 0*

Belanja Dibayar di Muka per 30 September 2023 sebesar Rp0. Belanja dibayar di muka merupakan hak yang masih harus diterima dari pihak ketiga setelah tanggal neraca sebagai akibat dari telah dibayarkannya secara penuh belanja dan membebani anggaran tahun anggaran berjalan namun barang atau jasa belum diterima.

C.1.3. Persediaan

*Persediaan: Rp
2.449.000*

Persediaan periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp2.449.000. Persediaan merupakan jenis aset dalam bentuk barang atau perlengkapan (supplies) pada tanggal neraca yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional dan untuk dijual, dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

C.2. Aset Tetap

*Aset Tetap : Rp
35.185.846.786*

Nilai Aset Tetap periode 30 September 2023 tersaji sebesar Rp35.185.846.786,- (tiga puluh lima milyar seratus delapan puluh lima juta delapan ratus empat puluh enam ribu tujuh ratus delapan puluh enam rupiah). Aset Tetap yang tersaji merupakan aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 bulan dan digunakan dalam kegiatan operasional entitas.

C.2.1. Tanah

*Tanah:
Rp2.819.580.000*

Nilai Aset Tetap berupa Tanah periode 30 September 2023 adalah sebesar Rp2.819.580.000,-(dua milyar delapan ratus sembilan belas juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah)

C.2.2. Peralatan dan Mesin

*Peralatan dan
Mesin : Rp
3.614.686.310*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa peralatan dan mesin periode 30 September 2023 sebesar Rp3.614.686.310,-(tiga milyar enam ratus empat belas juta enam ratus delapan puluh enam ribu tiga ratus sepuluh rupiah)

C.2.3. Gedung dan Bangunan

*Gedung dan
Bangunan : Rp
310.781.000*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Gedung dan Bangunan periode 30 September 2023 sebesar Rp310.781.000,- (tiga ratus sepuluh juta tujuh ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

C.2.4. Jalan , Irigasi, dan Jaringan

*Aset Jalan,
Irigasi, dan
Jaringan : Rp 0*

Nilai perolehan Aset Tetap berupa Jalan, Irigasi, dan Jaringan per 30 September 2023 adalah sebesar Rp0.

C.2.5. Aset Tetap Lainnya

*Aset Tetap
Lainnya:*

Aset Tetap Lainnya merupakan aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan dalam

Rp190.000 tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan. Nilai perolehan Aset Tetap Lainnya periode 30 September 2023 sebesar Rp190.000,- (seratus sembilan puluh ribu rupiah)

C.2.6. Konstruksi dalam Pengerjaan

Konstruksi dalam Pengerjaan : Rp 30.463.889.131 Saldo Konstruksi dalam Pengerjaan periode 30 September 2023 sebesar Rp30.463.889.131,-(tiga puluh dua milyar empat ratus enam puluh tiga juta delapan ratus delapan puluh sembilan ribu seratus tiga puluh satu rupiah)

C.2.7. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Akumulasi Penyusutan Aset tetap : Rp(2.023.279.655) Saldo Akumulasi Penyusutan Aset Tetap periode 30 September 2023 sebesar Rp(2.023.279.655),-(dua milyar dua puluh tiga juta dua ratus tujuh puluh sembilan ribu enam ratus lima puluh lima rupiah)

C.5. Kewajiban Jangka Pendek

Kewajiban Jangka Pendek : Rp2.342.560.914 Nilai Kewajiban Jangka Pendek periode 30 September 2023 sebesar Rp2.342.560.914,- (dua milyar tiga ratus empat puluh dua juta lima ratus enam puluh ribu sembilan ratus empat belas rupiah)

C.5.1. Uang Muka dari KPPN

Uang Muka dari KPPN: Rp35.400.000 Saldo Uang Muka dari KPPN per 30 September 2023 sebesar Rp35.400.000,- (tiga puluh lima juta empat ratus ribu rupiah). Uang Muka dari KPPN merupakan uang persediaan (UP) atau tambahan uang persediaan (TUP) diberikan KPPN sebagai uang muka kerja yang masih berada pada atau dikuasai oleh Bendahara Pengeluaran pada tanggal pelaporan. Uang Muka dari KPPN adalah akun pasangan dari Kas di Bendahara Pengeluaran yang ada di kelompok akun Aset Lancar.

C.6. Ekuitas

Ekuitas: Rp 32.881.361.813 Ekuitas periode 30 September 2023 sebesar Rp32.881.361.813,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah). Ekuitas adalah kekayaan bersih entitas yang merupakan selisih antara aset

dan kewajiban. Rincian lebih lanjut tentang ekuitas disajikan dalam Laporan Perubahan Ekuitas.

D. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Operasional

D.1. Pendapatan Penerimaan Negara bukan Pajak

Pendapatan PNP : Rp1.302.444 Jumlah Pendapatan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp1.302.444.

D.2. Beban Pegawai

Beban Pegawai : Rp 2.846.349.233 Jumlah Beban Pegawai untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp2.846.349.233,- (dua milyar delapan ratus empat puluh enam juta tiga ratus empat puluh sembilan ribu dua ratus tiga puluh tiga rupiah). Beban Pegawai adalah beban atas kompensasi, baik dalam bentuk uang maupun barang yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang diberikan kepada pejabat negara, Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan pegawai yang dipekerjakan oleh pemerintah yang belum berstatus PNS sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilaksanakan kecuali pekerjaan yang berkaitan dengan pembentukan modal.

D.3. Beban Persediaan

Beban Persediaan : Rp 17.051.200 Jumlah Beban Persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp17.051.200,- (tujuh belas juta lima puluh satu ribu dua ratus rupiah). Beban Persediaan merupakan beban untuk mencatat konsumsi atas barang-barang yang habis pakai, termasuk barang-barang hasil produksi baik yang dipasarkan maupun tidak dipasarkan.

D.4. Beban Barang dan Jasa

Beban Jasa : Rp650.890.309 Jumlah Beban Jasa untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp650.890.309,- (enam ratus lima puluh juta delapan ratus sembilan puluh ribu tiga ratus sembilan puluh rupiah). Beban Jasa adalah konsumsi atas jasa-jasa dalam rangka penyelenggaraan kegiatan entitas.

D.5. Beban Pemeliharaan

*Beban
Pemeliharaan:
Rp381.923.762*

Beban Pemeliharaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp381.923.762,- (tiga ratus delapan puluh satu juta sembilan ratus dua puluh tiga ribu tujuh ratus enam puluh dua rupiah). Beban Pemeliharaan merupakan beban yang dimaksudkan untuk mempertahankan aset tetap atau aset lainnya yang sudah ada ke dalam kondisi normal.

D.6. Beban Perjalanan Dinas

*Beban
Perjalanan
Dinas :
Rp35.680.000*

Beban Perjalanan Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp35.680.000,- (tiga puluh lima juta enam ratus delapan puluh ribu rupiah). Beban tersebut adalah merupakan beban yang terjadi untuk perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas, fungsi, dan jabatan.

D.7. Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat

*Beban Barang
untuk
Diserahkan
kepada
Masyarakat :
Rp0*

Beban Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0.

D.8. Beban Bantuan Sosial

*Beban Bantuan
Sosial : Rp0*

Beban Bantuan Sosial Tahun Dinas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp0. Beban bantuan sosial merupakan beban pemerintah dalam bentuk uang/barang atau jasa kepada masyarakat untuk menghindari terjadinya risiko sosial dan bersifat selektif.

D.9. Beban Penyusutan dan Amortisasi

*Beban
Penyusutan dan
Amortisasi : Rp
337.893.575*

Jumlah Beban Penyusutan dan Amortisasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp337.893.575,- (tiga ratus tiga puluh tujuh juta delapan ratus sembilan puluh tiga ribu lima ratus tujuh puluh lima rupiah). Beban Penyusutan adalah merupakan beban untuk mencatat alokasi sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Sedangkan Beban Amortisasi digunakan untuk mencatat alokasi penurunan manfaat ekonomi untuk Aset Tak berwujud.

D.10. Beban Penyisihan Piutang tak Tertagih

*Beban
Penyisihan
Piutang tak
Tertagih : Rp0*

Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih merupakan beban untuk mencatat estimasi ketidaktertagihan piutang dalam suatu periode. Jumlah Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0 dan

D.11. Beban Lain-lain

*Beban Lain-
Lain : Rp0*

Jumlah Beban Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 sebesar Rp0. Beban Lain-lain merupakan beban yang timbul karena penggunaan alokasi belanja modal yang tidak menghasilkan aset tetap.

D.12. Kegiatan Non Operasional

*Beban Kegiatan
Non
Operasional :
Rp0*

Pos Surplus(defisit) dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya *tidak* rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Beban kegiatan non oprasional untuk periode 30 September 2023 adalah Rp0.

D.13. Pos Luar Biasa

*Beban Pos Luar
Biasa : Rp0*

Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak sering terjadi, tidak dapat diramalkan dan berada di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk periode 30 September 2023 adalah Rp0.

E. Penjelasan atas Pos-pos Laporan Perubahan Ekuitas

E.1. Ekuitas Awal

Nilai ekuitas awal pada tanggal 30 September 2023 sebesar Rp31.782.520.630,- (tiga puluh satu milyar tujuh ratus delapan puluh dua juta lima ratus dua puluh ribu enam ratus tiga puluh rupiah)

E.2. Surplus (defisit) LO

Jumlah Defisit LO untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp(4.268.485.635),- (empat milyar dua ratus enam puluh delapan juta empat ratus delapan puluh lima ribu enam ratus tiga puluh lima rupiah). Defisit LO merupakan selisih kurang antara surplus/defisit kegiatan operasional, surplus/defisit kegiatan non

operasional, dan pos luar biasa.

E.3.1. Penyesuaian Nilai Aset

Nilai Penyesuaian Nilai Aset untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0. Penyesuaian Nilai Aset merupakan hasil penyesuaian nilai persediaan akibat penerapan kebijakan harga perolehan akhir.

E.3.2 Koreksi Nilai Persediaan

Koreksi Nilai Persediaan mencerminkan koreksi atas nilai persediaan yang diakibatkan karena kesalahan dalam penilaian persediaan yang terjadi pada periode sebelumnya. Koreksi nilai persediaan untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0.

E.3.3 Selisih Revaluasi Aset Tetap

- Selisih Revaluasi Aset Tetap merupakan selisih yang muncul pada saat dilakukan penilaian ulang aset tetap. Selisih Revaluasi Aset Tetap untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0.

E.3.4 Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi

- Koreksi Aset Tetap Non Revaluasi untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini berasal dari transaksi koreksi nilai aset tetap dan aset lainnya yang bukan karena revaluasi nilai.

E.3.5 Koreksi Lain-lain

Koreksi Lain-lain untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp0. Koreksi ini merupakan koreksi selain yang terkait Barang Milik Negara, antara lain koreksi atas pendapatan, koreksi atas beban, koreksi atas hibah, piutang dan utang.

E.3.6 Ekuitas Akhir

Nilai Ekuitas untuk periode yang berakhir pada 30 September 2023 adalah sebesar Rp32.881.361.813,- (tiga puluh dua milyar delapan ratus delapan puluh satu juta tiga ratus enam puluh satu ribu delapan ratus tiga belas rupiah).

F. Pengungkapan Penting Lainnya

F.1. Kejadian-kejadian Penting setelah Tanggal Neraca

Tidak ada kejadian penting setelah tanggal neraca yang layak untuk dijadikan catatan dalam laporan keuangan ini.

F.2. Pengungkapan Lain-lain

F.2.1. Temuan dan Tindak lanjut Temuan BPK

Tidak ada temuan dan tindak lanjut temuan BPK yang perlu diungkapkan dalam laporan keuangan ini.

F.2.2. Informasi Pendapatan dan Belanja secara Akrual

Tidak ada informasi pendapatan dan belanja secara akrual dalam laporan keuangan ini.

F.2.3. Rekening Pemerintah

Rekening pemerintah yang digunakan dalam kegiatan operasional Pengadilan Negeri Pangkalan Balai adalah:

1. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000497305 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 01 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BUA
2. BRI Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000496309 a.n. BPG 160 PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 03 yang digunakan sebagai Penampung DIPA BADILUM
3. Bank BRI (Persero) Cabang Pangkalan Balai A/C 110001000489302 a.n. RPL 160 PN P Balai Utk Biaya Perkara yang digunakan sebagai Penampung Biaya Perkara/Titipan Pihak ke-3

F.2.4. Revisi DIPA

1. Revisi ke-3 tertanggal 11 Juli 2023;
2. Revisi ke-4 tertanggal 17 Juli 2023;

F.2.5. Ralat SPM, SSBP, dan SSPB

Tidak ada informasi mengenai Ralat SPM, SP2D, SSBP, SSPB yang dapat dijabarkan dalam laporan keuangan ini .

F.2.6. Catatan Penting Lainnya

-Nihil-

LAPORAN PENDUKUNG

KERTAS KERJA TELAHAH LAPORAN KEUANGAN TAHUNAN

Tingkat Satker (Non BLU)

Periode : Triwulan III, T.A 2023

Kode Satker : 401909
 Nama Satker : Pengadilan Negeri Pangkalan Balai
 Nama Eselon 1 : Badan Urusan Administrasi
 Kode BA dan Nama BA : (005) Mahkamah Agung RI

Objek Penelaahan	Kondisi LK	Seharusnya	
<i>Beri tanda centang (✓) sesuai Laporan Keuangan.</i>			
<i>Bila terisi pada kolom yang tidak seharusnya, agar diuraikan pada lembar lampiran</i>			
KELENGKAPAN LAPORAN KEUANGAN			
Kelengkapan Komponen Laporan Keuangan Pokok	Ada	Tidak	Seharusnya
1. LRA face per 30 September 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
2. Neraca per 30 September 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
3. Laporan Operasional per 30 September 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
4. Laporan Perubahan Ekuitas per 30 September 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
5. Catatan atas laporan Keuangan	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
Lampiran Pendukung Laporan Keuangan	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Laporan yang dihasilkan oleh Aplikasi	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
2. Laporan Kuasa Pengguna barang	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
3. Daftar Rekening Pemerintah	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
4. Memo Penyesuaian atas Jurnal Penyesuaian/Umum di SAIBA	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Ada
KESESUAIAN DENGAN PERSAMAAN DASAR AKUNTANSI			
Persamaan dasar akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Nilai "Surplus/(Defisit)-LO" = Nilai "Surplus/ (Defisit) - LO" di LPE	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
2. Saldo Ekuitas Akhir di LPE = Saldo Ekuitas di Neraca	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
3. Aset = Kewajiban + Ekuitas	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
KESESUAIAN MIGRASI SALDO AWAL			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Saldo Awal Aset 2023 = Total Aset Audited 2023	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
2. Saldo Awal Kewajiban 2023 = Total Kewajiban Audited 2023 - Pendapatan Ditangguhkan + Akun 219671	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
3. Saldo Awal Ekuitas 2023= Total Ekuitas Dana Audited 2023 + Pendapatan Ditangguhkan - Akun 219671	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Sama
NERACA PERCOBAAN			
Pengecekan Saldo Tidak Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun dengan uraian "null" atau tidak ada uraiannya	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Tidak

Pengecekan posisi saldo (Debet atau Kredit)	Ya	tidak	Seharusnya
1. Apakah Akun Aset (1xxxx) bersaldo (D) <i>(kec.Penyisihan dan Akumulasi)</i>			Ya
2. Apakah Akun Penyisihan Piutang (116xxx) bersaldo (K)			Ya
3. Apakah Akun Akumulasi Penyusutan (137xxx dan 169xxx) bersaldo (K)			Ya
4. Apakah Akun Kewajiban (2xxxx) bersaldo (K)			Ya
5. Apakah Akun Pendapatan (4xxxx) bersaldo (K) <i>(kec.Pengembalian Pendapatan)</i>			Ya
6. Apakah Akun Pengembalian Pendapatan (4xxxx) bersaldo (D)			Ya
7. Apakah Akun Belanja/beban (5xxxx) bersaldo (D) <i>(kecuali Beban Penyisihan Piutang)</i>			Ya
8. Apakah seluruh Akun Pengembalian Belanja (5xxxx) bersaldo (K)			Ya
Akun-Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun 219671 (Hibah Langsung Yang Belum Disahkan)			Tidak
2. Adakah akun 391121 (Ekuitas Transaksi Lainnya) <i>Kec. Di RRI, TVRI dan POLRI</i>			Tidak
3. Adakah akun 41xxxx (Pendapatan Perpajakan)			Tidak
8. Adakah akun 423956 (Penerimaan kembali belanja hibah TAYL)			Tidak
9. Adakah akun 423958 (Penerimaan kembali belanja lain-lain TAYL)			Tidak
4. Adakah akun 424xxx (Pendapatan BLU)			Tidak
5. Adakah akun 43xxxx (Pendapatan Hibah)			Tidak
6. Adakah akun 525xxx (Belanja barang BLU)			Tidak
7. Adakah akun 537xxx (Belanja Modal BLU)			Tidak
8. Adakah akun "yang belum diregister"			Tidak
9. Adakah akun-akun lainnya yang seharusnya tidak ada pada K/L ybs.			Tidak
Hibah Langsung	Ya	Tidak	Seharusnya
Jika ada Akun 111827 (Kas Lainnya dari Hibah Yang Belum disahkan) maka ada akun			
1. 218211 (Hibah Langsung Yang belum disahkan), dengan nilai maksimal sama, bisa lebih kecil.			Ya
2. akun 218211 di kredit			Ya
Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Akun 391119 (Koreksi Lainnya)			Tidak
<i>Jika ada, uraikan dalam lampiran, Jurnal SAIBA yang dibuat dan penyebabnya.</i>			
2. Adakah Akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset lainnya)			Ada/tidak
<i>Akun ini jarang terjadi, jika ada, pastikan kebenarannya dan pastikan Jurnal kiriman dari Persediaan/SIMAK</i>			
LAPORAN OPERASIONAL			
Pengecekan Pos/Akun yang tidak boleh ada	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah pendapatan Perpajakan			Tidak
2. Adakah pendapatan Hibah			Tidak
3. Adakah beban bunga			Tidak
4. Adakah beban subsidi			Tidak
5. Adakah beban hibah			Tidak
6. Adakah beban transfer			Tidak
7. Adakah beban lain-lain			Tidak
Pengecekan saldo Normal	Ada	Tidak	Seharusnya
8. Adakah akun "null" atau tidak ada uraiannya			Tidak
<i>Seluruh Nilai Normal Akun LO adalah Positif, kecuali beban penyisihan piutang dapat bernilai negatif</i>			

9. Kegiatan Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan			Positif
- Beban Pegawai			Positif
- Beban Persediaan			Positif
- Beban Barang dan Jasa			Positif
- Beban Pemeliharaan			Positif
- Beban Perjalanan Dinas			Positif
- Beban Barang Untuk Diserahkan kpd Masyarakat			Positif
- Beban Penyusutan dan Amortisasi			Positif
- Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih			Pos/Neg

10. Kegiatan Non Operasional	Positif	Negatif	Seharusnya
- Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar			Positif
- Beban Pelepasan Aset non Lancar			Positif
- Pendapatan Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Beban Penyelesaian Kewajiban jangka Panjang			Positif
- Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif
- Beban dari Kegiatan Non Operasional lainnya			Positif

Pengecekan antar laporan	Ya	Tidak	Seharusnya
11. Adakah beban barang diserahkan ke Masyarakat/bansos?			Ya/Tidak
Jika Ya, adakah realisasi akun 526xxx/57xxx?			Ya

Jika tidak ada realisasi akun 526xxx, kemungkinannya hanya dari pembelian Materai, atau pembelian tahun lalu, penyerahan tahun berjalan.

LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

Pengecekan akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah Pos "penyesuaian Nilai Aset"			Ada
2. Adakah akun "Selisih Revaluasi Aset Tetap" ?			Tidak

Bila ada, cek apakah berasal dari Inventarisasi dan Penilaian? Akun ini hanya khusus dari IP dan Jurnal kiriman dari SIMAK. Uraikan hasil pengecekan dalam lampiran TLK

Akun-akun pada LPE "terkadang" digunakan untuk pasangan jurnal yang tidak seharusnya (misal: untuk menghilangkan "belum diregister", menyamakan dengan L-BMN, dll), dengan demikian agar dilakukan penelaahan mendalam terhadap jurnal yang melibatkan akun-akun ini.

NERACA

Pengecekan Persamaan Akuntansi	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Kas Di Bendahara Pengeluaran = Uang Muka dari KPPN			Sama

Pengecekan Akun tertentu	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Adakah akun "Pendapatan yang ditanggihkan" ?			Tidak

Pengecekan Keterkaitan Transaksi	Ada	Tidak	Seharusnya
----------------------------------	-----	-------	------------

Jika Jawaban awal "ADA", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya "ADA", sebaliknya, bila jawaban awal "TIDAK", maka jawaban sub pertanyaan seharusnya juga "TIDAK"

1. Ada Akun Piutang maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Penyisihan Piutang			Ada/Tidak
- Beban Penyisihan Piutang (di LO)			Ada/Tidak
2. Ada Piutang jangka Panjang (TP/TGR)			Ada/Tidak
- Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
- Penyisihan Bagian Lancar Piutang Jangka Panjang			Ada/Tidak
3. Ada persediaan maka akan ada akun:			Ada/Tidak
Beban Persediaan (di LO)			Ada/Tidak
- Penyesuaian Nilai Aset (di LPE)			Ada/Tidak
4. Ada Aset Tetap/Aset Lainnya maka akan ada akun:			Ada/Tidak
- Akumulasi AT/AL			Ada/Tidak
- Beban Penyusutan/Amortisasi (di LO)			Ada/Tidak

Pengecekan Apakah sudah melakukan Jurnal Akrua	Ada	Tidak	Seharusnya
1. Ada realisasi pendapatan Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada pendapatan diterima Dimuka			Ada/Tidak
2. Ada realisasi Belanja Sewa di Neraca Percobaan			Ada/Tidak
- Ada belanja Barang dibayar dimuka			Ada/Tidak
3. Ada realisasi belanja Jasa Listrik di Neraca Percobaan			Ada/Tidak

TELAAH KESESUAIAN DENGAN LAP. BMN (APLIKASI PERSEDIAAN & SIMAK)

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Posisi BMN di Neraca (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Persediaan			Sama
2. Aset Tetap			Sama
3. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap			Sama
4. Aset Lainnya			Sama
5. Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya			Sama

Bandingkan Neraca Percobaan (SAIBA) dengan Laporan Penyusutan Barang Kuasa Pengguna INTRAKOMPTABEL (SIMAK) untuk:

	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Beban Penyusutan 591xxx (SAIBA) dengan kolom 7 (SIMAK)			Sama
2. Akumulasi Penyusutan 137xxx dan 169xxx (SAIBA) dengan kolom 9 (SIMAK)			Sama

Semenjak menggunakan basis AkruaI, masing-masing Menu baik di Aplikasi Persediaan maupun di Aplikasi SIMAK akan mengirim jurnal yang berbeda ke Aplikasi SAIBA. Untuk itu perlu dilakukan pengecekan di Aplikasi Persediaan dan SIMAK-BMN, apakah input sudah menaauanakan menu vana sesuai atau belum.

	Sesuai	Belum	Seharusnya
- Aplikasi Persediaan (Menu Laporan - Daftar Transaksi Persediaan)	N/A	N/A	
- Aplikasi SIMAK-BMN (Menu Buku/Daftar - Daftar Transaksi BMN)	N/A	N/A	

Akun-akun tertentu terkait ASET, seharusnya hanya kiriman dari Aplikasi Persediaan/SIMAK. Periksa di Aplikasi SAIBA, Laporan Buku Besar AkruaI per Kode Akun, apakah ada transaksi dari JNS DOK: selain SALDO atau JRNBMN

Adakah selain JNS DOK: SALDO atau JRNBMN atas akun-akun dibawah ini?	Ya	Tidak	Seharusnya
Akun 313211 (transfer keluar) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 313221 (transfer masuk) kecuali Satker Likuidasi, ada dari JRN NRC			Tidak
Akun 391113 (Koreksi Nilai Persediaan)			Tidak
Akun 391114 (Revaluasi Aset Tetap)			Tidak
Akun 391116 (Koreksi Nilai Aset Tetap Non Revaluasi)			Tidak
Akun 391117 (Penyesuaian Nilai Persediaan)			Tidak
akun 491421 (Pendapatan Sitaan/Rampasan)			Tidak
akun 491429 (Pendapatan Perolehan Aset Lainnya)			Tidak
Akun 596111 (beban Kerugian Pelepasan Aset)			Tidak
Akun 596121 (Kerugian Persediaan Rusak/Usang)			Tidak

LAPORAN REALISASI ANGGARAN/BELANJA (LRA/B)			
	Ada	Tidak	Seharusnya
1 Adakah saldo negatif di LRAB			Tidak
2 Ada uraian jenis belanja "tidak ada"			Tidak
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN			
Kesesuaian antara ADK, Face Laporan dan CaLK			
	Sama	Tidak	Seharusnya
1. Rincian yang ada di CaLK sama dengan LKKL (Neraca Percobaan)			Sama
Kecukupan pengungkapan pada CaLK			
	Ya	Tidak	Seharusnya
2. Apakah akun "Hibah yang belum Disahkan" telah dijelaskan?			Ya
3. Apakah pengungkapan KDP telah sesuai dengan SAP/PMK 177/2015 ?			Ya
4. Apakah semua akun di LO dan LPE telah dijelaskan?			Ya
Pengungkapan Penting Lainnya			
	Ya	Tidak	Seharusnya
5. Untuk KL Likuidasi: Apakah perubahan Manajemen telah diungkapkan?			Ya
6. Adakah Pengungkapan lainnya sesuai karakteristik masing-masing KL			Ya
<i>(misalnya: Status Tuntutan Hukum Pihak Ketiga (Incrakht, penganggaran), Barang Bukti, dll)</i>			

Mengetahui
Pejabat Penyusun LKKL



(Eunike Mayerni Batubara, A.Md.A.B)
NIP 199905222022032007



Pangkalan Balai, 03 Oktober 2023

Penelaah,



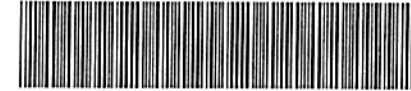
(Andrianto Fachrizal, S.Kom)
NIP.197612032011011005

LAMPIRAN KERTAS KERJA TELAAH LAPORAN KEUANGAN

"Uraikan kode akun dan penyebab terisi pada kolom yang TIDAK SEHARUSNYA, serta hal-hal lainnya yang diperlukan"



**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : SP DIPA- 005.03.2.402017/2023**



DS:6277-3948-7345-6398

A. Dasar Hukum:

- 1.UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2.UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3.UU No.28 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2023

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

1. Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 2. Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 3. Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 4. Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
- Sebesar : Rp. 187.800.000 (SERATUS DELAPAN PULUH TUJUH JUTA DELAPAN RATUS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

03 KETERTIBAN DAN KEAMANAN
03.04 PERADILAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

005.03.BF Program Penegakan dan Pelayanan Hukum
005.03.BF.1049 Peningkatan Manajemen Peradilan Umum

Jumlah Uang

Rp. 187.800.000
Rp. 187.800.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

1. Rupiah Murni	Rp.	187.800.000	4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
2. PNBP			- Pinjaman Dalam Negeri	Rp.	0
PNBP TA Berjalan	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0	5. Hibah Langsung	Rp.	0
- Pinjaman Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Luar Negeri Langsung	Rp.	0
- Hibah Luar Negeri	Rp.	0	- Hibah Dalam Negeri Langsung	Rp.	0
			6. SBSN PBS	Rp.	0

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

1. KPPN S E K A Y U (160) Rp. 187.800.000

E. Pernyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
2. DIPA Petikan ini dicetak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentifikasi).
3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan satker dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
5. Tanggung Jawab terhadap penggunaan anggaran yang tertuang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-K/L-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.



Jakarta, 30 November 2022
A.N. MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

ttd.
ISA RACHMATARWATA
NIP. 196612301991021001

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023
I A. INFORMASI KINERJA**



DS:6277-3948-7345-6398

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

						Halaman : I A. 1
Program	:	005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum			187.800.000
Kegiatan	:	1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum			187.800.000
Indikator Kinerja Kegiatan	:	1. 01	Jumlah Tata Kelola Administrasi Peradilan umum yang di susun			
		2. 01	Jumlah layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum			
		3. 01	Monitoring putusan yang ditindaklanjuti (eksekusi) di Lingkungan Peradilan Umum			
		4. 02	Jumlah Perkara Peradilan Umum yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara			
		5. 02	Jumlah perkara peradilan umum yang diselesaikan di tingkat pertama dan tingkat banding tepat waktu			
		6. 03	Jumlah Perkara yang di selesaikan melalui Sidang diluar Gedung Pengadilan			
		7. 03	Persentase putusan yang menggunakan pendekatan keadilan restorative di Mahkamah Agung			
Klasifikasi Rincian Output 1	:	1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan	420,00	Perkara, Berkas Perkara	163.800.000
Rincian Output	:	01 BCA.U03	Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	420.00	Perkara	163.800.000
Klasifikasi Rincian Output 2	:	1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan	33,00	Orang	24.000.000
Rincian Output	:	01 QBA.032	Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Umum (PN)	33.00	Orang	24.000.000

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023**



DS:6277-3948-7345-6398

I B. SUMBER DANA

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : I B. 1

1. Anggaran Tahun 2023	Rp.	187.800.000		Ket :	a. Pinjaman Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
1. Rupiah Murni	Rp.	187.800.000			(2) RPLN	US\$	0	Rp.	0
2. PNPB	Rp.	0			b. Hibah Luar Negeri (1) Valuta Asing	US\$	0	Rp.	0
3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri	Rp.	0			(2) RHLN	US\$	0	Rp.	0
4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri	Rp.	0			c. Pinjaman Dalam Negeri	IDR	0		
5. Hibah Langsung	Rp.	0			d. Hibah Dalam Negeri	IDR	0		
6. SBSN PBS	Rp.	0			e. Hibah Luar Negeri Langsung	IDR	0		
2. Rincian Pinjaman / Hibah :					f. Hibah Dalam Negeri Langsung	IDR	0		

(dalam ribuan rupiah)

No.	SUMBER PINJAMAN DAN HIBAH No. NPP/H per Tahun No. Register		PAGU TAHUN INI		RINCIAN DANA BERDASARKAN CARA PENARIKAN		DANA PENDAMPING		
	Kode	Uraian	Kode	Dana	Kode	Dana	Rp. Pdp	Rp.LN	Rp.Loc.Cost
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

NPP/H : Naskah Perjanjian Pinjaman dan/atau Hibah

DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN

TAHUN ANGGARAN 2023

NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023

II. RINCIAN PENGELUARAN



DS:6277-3948-7345-6398

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
 Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
 Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
 Kode/Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI
 Kewenangan : (KD)

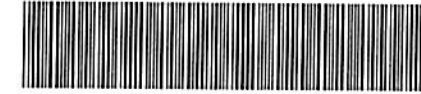
Halaman : II. 1
 (dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN SATKER/PROGRAM/KEGIATAN/KRO/SUMBER DANA	BELANJA						LOKASI/ KPPN	CARA PENARIKAN/ REGISTER
		PEGAWAI [51]	BARANG [52]	MODAL [53]	BANTUAN SOSIAL [57]	LAIN-LAIN [58]	JUMLAH SELURUH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI	-	187.800	-	-	-	187.800		
005.03.BF	Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	-	187.800	-	-	-	187.800		
1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	-	187.800	-	-	-	187.800		
1049.BCA	Perkara Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	163.800	-	-	-	163.800	11.09	
01 RM		-	163.800	-	-	-	163.800	160	
1049.QBA	Layanan Bantuan Hukum Perseorangan (11.09 SUMATERA SELATAN / KAB. BANYUASIN)	-	24.000	-	-	-	24.000	11.09	
01 RM		-	24.000	-	-	-	24.000	160	
JUMLAH		-	187.800	-	-	-	187.800		

Jakarta, 30 November 2022
 Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
 H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
 NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023
III. RENCANA PENARIKAN DANA DAN PERKIRAAN PENERIMAAN**



DS:6277-3948-7345-6398

Kementerian Negara/Lembaga : (005) MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : (03) Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : (11) SUMATERA SELATAN
Kode>Nama Satker : (402017) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : III. 1
(dalam ribuan rupiah)

NO	KODE	URAIAN SATKER	RENCANA PENARIKAN												JUMLAH SELURUH
			JANUARI	FEBRUARI	MARET	APRIL	MEI	JUNI	JULI	AGUSTUS	SEPTEMBER	OKTOBER	NOVEMBER	DESEMBER	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1	402017	PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI													
		RENCANA PENARIKAN DANA	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.672	187.800
		BELANJA BARANG	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.672	187.800
	005.03.BF.1049	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.672	187.800
		52 BELANJA BARANG DAN BARANG	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.648	15.672	187.800
		PERKIRAAN PENERIMAAN	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.974	2.984	35.698
		- PNBP (425233)	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	307	313	3.690
		- PNBP (425239)	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.667	2.671	32.008

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023
IV A. B L O K I R**



DS:6277-3948-7345-6398

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.A. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ttd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

**DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2023
NOMOR : DIPA- 005.03.2.402017/2023
IV B. C A T A N**



DS:6277-3948-7345-6398

Kementerian Negara/Lembaga : [005] MAHKAMAH AGUNG
Unit Organisasi : [03] Ditjen Badan Peradilan Umum
Provinsi : [11] SUMATERA SELATAN
Kode dan Nama Satker : [402017] PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Halaman : IV.B. 1
(dalam ribuan rupiah)

KODE	URAIAN	KODE	URAIAN

Jakarta, 30 November 2022
Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum

ltd.
H. Bambang Myanto, S.H., M.H.
NIP. 196805231992121002

NERACA
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 30/10/23 12:37 PM
Halaman : 1

lap_neraca_satker_komparatif

NAMA PERKIRAAN	JUMLAH		Kenaikan (Penurunan)	
	2023	2022	Jumlah	%
1	2	3	4	5
ASET				
ASET LANCAR				
Kas di Bendahara Pengeluaran	35,400,000	0	35,400,000	0.00
Piutang Bukan Pajak	226,941	0	226,941	0.00
PIUTANG BUKAN PAJAK (NETTO)	226,941	0	226,941	0.00
Persediaan	2,449,000	0	2,449,000	0.00
JUMLAH ASET LANCAR	38,075,941	0	38,075,941	
ASET TETAP				
Tanah	2,819,580,000	2,819,580,000	0	0.00
Peralatan dan Mesin	3,614,686,310	3,587,381,310	27,305,000	0.76
Gedung dan Bangunan	310,781,000	310,781,000	0	0.00
Aset Tetap Lainnya	190,000	190,000	0	0.00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	30,463,889,131	26,748,832,288	3,715,056,843	13.89
AKUMULASI PENYUSUTAN	(2,023,279,655)	(1,682,459,330)	(340,820,325)	20.26
JUMLAH ASET TETAP	35,185,846,786	31,784,305,268	3,401,541,518	10.70
JUMLAH ASET	35,223,922,727	31,784,305,268	3,439,617,459	10.82
KEWAJIBAN				
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK				
Utang kepada Pihak Ketiga	2,280,658,806	1,784,638	2,278,874,168	127,693.92
Utang Yang Belum Ditagihkan	26,502,108	0	26,502,108	0.00
Uang Muka dari KPPN	35,400,000	0	35,400,000	0.00
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	2,342,560,914	1,784,638	2,340,776,276	131,162.53
JUMLAH KEWAJIBAN	2,342,560,914	1,784,638	2,340,776,276	131,162.53
EKUITAS				
EKUITAS				
Ekuitas	32,881,361,813	31,782,520,630	1,098,841,183	3.46
JUMLAH EKUITAS	32,881,361,813	31,782,520,630	1,098,841,183	3.46
JUMLAH EKUITAS	32,881,361,813	31,782,520,630	1,098,841,183	3.46
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS	35,223,922,727	31,784,305,268	3,439,617,459	10.82

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/10/23 12:38 PM

Halaman : 1

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
0.0	111611	Kas di Bendahara Pengeluaran	35,400,000	0
0.0	115212	Piutang Lainnya	226,941	0
0.0	117111	Barang Konsumsi	2,449,000	0
0.0	131111	Tanah	2,819,580,000	0
0.0	132111	Peralatan dan Mesin	3,614,686,310	0
0.0	133111	Gedung dan Bangunan	310,781,000	0
0.0	135121	Aset Tetap Lainnya	190,000	0
0.0	136111	Konstruksi Dalam pengerjaan	30,463,889,131	0
0.0	137111	Akumulasi Penyusutan Peralatan dan Mesin	0	1,857,172,095
0.0	137211	Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan	0	166,107,560
0.0	212111	Belanja Pegawai yang Masih Harus Dibayar	0	212,201,256
0.0	212113	Belanja Modal yang Masih Harus Dibayar	0	2,068,457,550
0.0	218111	Utang Yang Belum Diterima Tagihannya	0	26,502,108
0.0	219511	Uang Muka dari KPPN	0	35,400,000
0.0	313111	Ditagihkan ke Entitas Lain	0	5,347,024,071
0.0	313121	Diterima dari Entitas Lain	1,075,503	0
0.0	313221	Transfer Masuk	0	21,378,250
0.0	391111	Ekuitas	0	31,782,520,630
3.0	425131	Pendapatan Sewa Tanah, Gedung, dan Bangunan	0	1,302,444
3.0	511111	Beban Gaji Pokok PNS	1,335,048,380	0
3.0	511119	Beban Pembulatan Gaji PNS	21,437	0
3.0	511121	Beban Tunj. Suami/Istri PNS	93,024,020	0
3.0	511122	Beban Tunj. Anak PNS	26,382,038	0
3.0	511123	Beban Tunj. Struktural PNS	23,140,000	0
3.0	511124	Beban Tunj. Fungsional PNS	1,002,340,000	0
3.0	511125	Beban Tunj. PPh PNS	94,035,238	0
3.0	511126	Beban Tunj. Beras PNS	78,648,120	0
3.0	511129	Beban Uang Makan PNS	172,350,000	0
3.0	511151	Beban Tunjangan Umum PNS	21,360,000	0
3.0	521111	Beban Keperluan Perkantoran	525,056,109	0
3.0	521114	Beban Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat	873,300	0
3.0	521115	Beban Honor Operasional Satuan Kerja	47,944,000	0
3.0	521252	Beban Peralatan dan Mesin - Ekstrakomptabel	1,440,000	0
3.0	522112	Beban Langganan Telepon	1,782,900	0
3.0	522113	Beban Langganan Air	3,234,000	0
3.0	522141	Beban Sewa	70,560,000	0
3.0	523111	Beban Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	251,136,440	0
3.0	523121	Beban Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	130,787,322	0

NERACA PERCOBAAN (BASIS AKRUAL)

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/10/23 12:38 PM

Halaman : 2

lap_neraca_percobaan_akrual_satker

KODE TRN	KODE AKUN	NAMA AKUN	DEBET	KREDIT
1	2	3	4	5
3.0	524111	Beban Perjalanan Biasa	35,680,000	0
3.0	591111	Beban Penyusutan Peralatan dan Mesin	324,741,444	0
3.0	591211	Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	13,152,131	0
3.0	593111	Beban Persediaan konsumsi	17,051,200	0
JUMLAH			41,518,065,964	41,518,065,964

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Penanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom

197612032011011005

LAPORAN OPERASIONAL
TINGKAT SATUAN KERJA
PER 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG
UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI
WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN
SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/10/23 12:38 PM

Halaman : 1

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
KEGIATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN OPERASIONAL	0	0	0	
PENDAPATAN PERPAJAKAN	0	0	0	
Pendapatan Pajak Penghasilan	0	0	0	
Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah	0	0	0	
Pendapatan Pajak Bumi dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	0	0	0	
Pendapatan Cukai	0	0	0	
Pendapatan Pajak Lainnya	0	0	0	
Pendapatan Bea Masuk	0	0	0	
Pendapatan Bea Keluar	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Perpajakan	0	0	0	
PENDAPATAN NEGARA BUKAN PAJAK	0	0	0	
Pendapatan Sumber Daya Alam	0	0	0	
Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba	0	0	0	
Pendapatan Negara Bukan Pajak Lainnya	1,302,444	0	1,302,444	
Jumlah Pendapatan Negara Bukan Pajak	1,302,444	0	1,302,444	
PENDAPATAN HIBAH	0	0	0	
Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan Hibah	0	0	0	
Jumlah Pendapatan	1,302,444	0	1,302,444	
BEBAN OPERASIONAL	0	0	0	
Beban Pegawai	2,846,349,233	2,847,326,141	(976,908)	(0.034)
Beban Persediaan	17,051,200	23,250,250	(6,199,050)	(26.662)
Beban Barang dan Jasa	650,890,309	745,379,156	(94,488,847)	(12.677)
Beban Pemeliharaan	381,923,762	108,685,871	273,237,891	251.401
Beban Perjalanan Dinas	35,680,000	41,061,343	(5,381,343)	(13.106)
Beban Barang Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat	0	0	0	
Beban Bunga	0	0	0	

LAPORAN OPERASIONAL

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 6:00 AM

Tgl Cetak : 30/10/23 12:38 PM

Halaman : 2

lap_lo_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
Beban Subsidi	0	0	0	
Beban Hibah	0	0	0	
Beban Bantuan Sosial	0	0	0	
Beban Penyusutan dan Amortisasi	337,893,575	235,022,138	102,871,437	43.771
Beban Penyisihan Piutang Tak Tertagih	0	0	0	
Beban Transfer	0	0	0	
Beban Lain-Lain	0	0	0	
JUMLAH BEBAN	4,269,788,079	4,000,724,899	269,063,180	6.725
SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN OPERASIONAL	(4,268,485,635)	(4,000,724,899)	(267,760,736)	6.693
KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	0	0	
Surplus/Defisit Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Pendapatan Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Beban Pelepasan Aset Non Lancar	0	0	0	
Surplus/Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Pendapatan Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Beban Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang	0	0	0	
Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	157	(157)	(100)
Pendapatan dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	157	(157)	(100)
Beban dari Kegiatan Non Operasional Lainnya	0	0	0	
JUMLAH SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	0	157	(157)	(100)
SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(4,268,485,635)	(4,000,724,742)	(267,760,893)	6.693
POS LUAR BIASA	0	0	0	
Beban Luar Biasa	0	0	0	
POS LUAR BIASA	0	0	0	
SURPLUS/DEFISIT - LO	(4,268,485,635)	(4,000,724,742)	(267,760,893)	6.693

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023

Pehanggung Jawab UAKPA

Sekretaris



ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom

197612032011011005

**LAPORAN REALISASI ANGGARAN SATUAN KERJA
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR 30 SEPTEMBER 2023
(DALAM RUPIAH)**



KEMENTERIAN/LEMBAGA : MAHKAMAH AGUNG 005
ESELON I : BADAN URUSAN ADMINISTRASI 01
SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI 401909

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM
Tgl Cetak : 30/10/23 12:39 PM
Halaman : 2
lap_ira_face_satker_komparatif

NO	URAIAN	2023				2022			
		ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%	ANGGARAN	REALISASI	REALISASI DI ATAS (BAWAH) ANGGARAN	%
1	2	3	4	5	6	3	4	5	6
	Dana Alokasi Umum	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Data Otonomi Khusus	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Alokasi Khusus Non Fisik	0	0	0	0	0	0	0	0
	Dana Desa	0	0	0	0	0	0	0	0
	JUMLAH BELANJA (B I + B II)	11,752,414,000	5,347,024,071	6,405,389,929	45	9,302,969,000	3,636,005,398	5,666,963,602	39
C	PEMBIAYAAN				0				0

Keterangan :
FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023
Penanggung Jawab UAKPA
Sekretaris

ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
197612032011011005



LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS

TINGKAT SATUAN KERJA

PER 30 SEPTEMBER 2023

(DALAM RUPIAH)



KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA : (005) MAHKAMAH AGUNG

UNIT ORGANISASI : (01) BADAN URUSAN ADMINISTRASI

WILAYAH/PROVINSI : (1100) SUMATERA SELATAN

SATUAN KERJA : (401909) PENGADILAN NEGERI PANGKALAN BALAI

Tgl Data : 30/10/23 12:00 PM

Tgl Cetak : 30/10/23 12:39 PM

Halaman : 1

lap_lpe_satker

URAIAN	2023	2022	KENAIKAN/ PENURUNAN	(%)
EKUITAS AWAL	31,782,520,630	27,156,365,131	4,626,155,499	-
SURPLUS/DEFISIT-LO	(4,268,485,635)	(4,000,724,742)	(267,760,893)	-
KOREKSI YANG MENAMBAH/MENGURANGI EKUITAS	0	0	0	-
LAIN-LAIN	0	0	0	-
TRANSAKSI ANTAR ENTITAS	5,367,326,818	3,841,509,991	1,525,816,827	-
KENAIKAN/PENURUNAN EKUITAS	1,098,841,183	(159,214,751)	1,258,055,934	-
EKUITAS AKHIR	32,881,361,813	26,997,150,380	5,884,211,433	-

Keterangan :

FINAL

Pangkalan Balai, 30 Oktober 2023
 Penanggung Jawab UAKPA
 Sekretaris

 ANDRIANTO FACHRIZAL S.Kom
 197612032011011005